

ABSTRAK

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang dilakukan selama hidupnya. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja seperti teman, kerabat atau pun anak kandung sekali pun. Penghibahan termasuk perjanjian “ dengan Cuma-Cuma “ (*om nict*) makna itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “timbal balik” (*bilateral*). Perjanjian pada umumnya adalah memiliki timbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi. Pengertian diatas sesuai dengan isi pasal 1666 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Berbeda dengan pasal 212 kompilasi hukum islam yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali. Undang undang manakah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjawab kasus ini. Maka Bagaimana sikap notaris selaku pejabat umum didalam membuat akta hibah (akta otentik) dengan adanya ketentuan Pasal 212 kompilasi hukum islam dan Pasal 1666 KUHPerdara didalam praktiknya. Lalu Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap akta hibah seseorang kepada anaknya yang ditarik kembali oleh orang tuanya. Terkait kasus ini akan dibahas secara mendalam dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dibantu dengan metode pengumpulan data primer dan skunder. Dengan tujuan agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini terdapat dua sumber hukum yang memiliki pendapat yang berbeda, dimana antara keduanya memiliki kekuatan yang sama, diibaratkan koin yang memiliki dua sisi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan. Untuk menyikapi ini seorang notaris dituntut untuk terus menggali ilmu pengetahuannya tidak hanya dibidang kenotariatan melainkan ilmu pengetahuan lainnya khususnya ilmu hukum dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Walaupun untuk memutus apakah suatu hibah ini dapat ditarik kembali atau tidak bukan merupakan kewenangan seorang notaris melainkan wewenang seorang hakim, bukan berarti seorang notaris tidak memiliki tanggung jawab atau lepas dari tanggung jawab. Akan tetapi peran dan tanggung jawab seorang notaris adalah mencegah terjadinya kejadian tersebut dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak (masyarakat) untuk tidak memberikan hibah berupa barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi, atau bagi orang tua yang menghibahkan kepada anaknya tidak melebihi 1/3 harta kekayaan menurut Kompilasi Hukum Islam dan tidak melebihi *Legitime Portie* (LP) menurut KUHPerdara. Agar terhidar dari masalah ini seorang notaris dapat memberikan klausul-klausul khusus terkait unsur apa saja yang dapat membatalkan pemberian hibah tersebut. Karena didalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan unsur apa yang dapat dijadikan pedoman agar hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali. Untuk lebih memperjelas pengetahuan maka penulis akan menjelaskan secara lebih fokus didalam tesis ini.

Kata kunci: Notaris, Akta, Hibah

Abstract

Grants are a gift to someone else who has done during his life. Grants can be awarded to any friend, relative or biological child. The grant includes a "free" agreement (om niet) meaning is shown in only the achievements of one party only, while the other party does not need to provide counter-achievement in return. Such a treaty is also called "unilateral" (Unilateral) as opposed to a "reciprocal agreement" (birateral). The covenant in general is to have reciprocity, since the common one is that the person who commits an achievement because he or she will receive a kotra-perstasi. The above understanding is in accordance with the contents of article 1666 of the Civil Code, which explains that the grant was taken can be withdrawn. In contrast to article 212 compilation of Islamic law which explains that the grant of parents to their children can be withdrawn. Which law can be the legal basis for answering this case. Here the role of a notary and his / her responsibilities are needed to solve this problem. A notary is required to find a way out of this problem. For this case the notary does not work alone but there is a meddling of a judge who disconnects because he / she can decide whether this grant can be withdrawn or not. Which law can be used as a legal basis to answer this case. So how is the attitude of a notary as a general official in making a grant deed (authentic deed) with the provision of Article 212 compilation of Islamic law and Article 1666 of the Civil Code in practice. Then What is the role and responsibility of the Notary towards the deed of one's grant to his child which is withdrawn by his parents. Related to this case will be discussed in depth using normative juridical research methods assisted with primary and secondary data collection methods. With the aim of getting answers to the problems found in this writing. In this writing there are two sources of law that have different opinions, where between the two have the same strength, like a coin that has two different sides but is a unity. In response to this, a notary is required to continue to explore his knowledge not only in the notary field but in other sciences, especially law and following developments in the community. Although to decide whether a grant can be withdrawn or not is not a authority of a notary but the authority of a judge, it does not mean that a notary does not have responsibility or escape responsibility. However, the role and responsibility of a notary is to prevent the occurrence of this incident by providing legal counsel to the parties (community) not to provide grants in the form of goods that have very high value, or for parents who grant to their children do not exceed 1/3 wealth according to the Compilation of Islamic Law and not annexing Legitime Portie (LP) according to the Civil Code. In order to avoid this problem a notary can provide specific clauses regarding what elements can cancel the grant. Because in article 212 the Compilation of Islamic Law does not explain what elements can be used as guidelines so that parents' gifts to their children can be withdrawn. To further clarify knowledge, the writer will explain more focus in this thesis.

Keywords: Notaries, Deed, Grants